RENCANA KERJA AKHIR
(RENJA)
TAHUN 2025



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN LABUHANBATU

JL. WR. SUPRATMAN NO. 48

TELP. (0624) 21865 - 325772

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 54 Tahun 2019, tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa OPD menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD. Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD tahun 2022-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) Akhir Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 disusun sebagai arahan pelaksanaan tupoksi seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu yang berisi program dan kegiatan sesuai tupoksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dan berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 ini bermanfaat dalam rangka meningkatkan kinerja dan sebagai bahan perencanaan pembangunan terutama di bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Labuhanbatu pada masa sekarang dan yang akan datang.

Rantauprapat, 16 Juli 2024
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Labuhanbatu

Ir. ADLIN TANJUNG, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680303 199503 1 001

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 2

1.1 Latar belakang 2
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 (n-2) 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kelautan dan Perikanan 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 12
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 14
2.4 Reviu terhadap Rancangan awal RKPD 19

BAB III TUJUAN DAN SASARAN 22

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi 22
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Provinsi Sumatera Utara 24
3.3. Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan 29

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDAANAN PERANGKAT DAERAH 38

BAB V PENUTUP 41

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal untuk melaksanakan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan salah satunya adalah Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan perencanaan tahunan dari Organisasi Perangkat daerah yang bersangkutan. Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD yang merupakan perencanaan tahunan dari OPD yang bersangkutan, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal untuk melaksanakan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan RENJA adalah salah satunya. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan

memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD. Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun ini menyusun Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025. Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021 – 2026 sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 – 2026 yaitu : “Terwujudnya Masyarakat Labuhanbatu yang Berkarakter, Maju dan Sejahtera Tahun 2024” Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Dinas Kelautan dan Perikanan Labuhanbatu Tahun 2021 – 2026 sesuai Misi ke-3 RPJMD kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut : “Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi daerah melalui peningkatan produktivitas koperasidan UMKM serta industri kreatif”. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 ini adalah :

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
6. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
8. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
9. Intruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021;

11. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
13. Peraturan Daerah tentang Penetapan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022;
14. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
15. Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penetapan RKPD Kabupaten Labuhanbatu Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 05 Juli 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025. Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RENJA) Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan ini adalah :

a. Sebagai perwujudan pertanggungjawaban tertulis dan gambaran mengenai perencanaan pelaksanaan kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mencapai sasaran dan tujuan pada tahun 2025;
b. Sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan selama 1 (satu) tahun;
c. Sebagai bahan acuan dalam rangka penyusunan/perencanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah pada tahun-tahun selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah

ditentukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan hasil pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD;

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 (n-2)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung-jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku

dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Evaluasi dan analisis kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran serta evaluasi akuntabilitas keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu pada tahun anggaran 2023 dilakukan pada 5 program dan 16 kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023 dibiayai dari APBD Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp. 4.275.668.487,00 (*empat milyar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*). Dengan realisasi Rp. *3,985,075,682*,00 (*tiga milyar Sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah*). Adapun penggunaan dana tersebut, sejumlah Rp 4.265.991.537,00 (*empat milyar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah*) dipergunakan untuk Belanja Operasi sedangkan Rp. 9.676.950,00 (*sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*) dipergunakan untuk Belanja Modal. Evaluasi dan analisis kinerja kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu beserta indikatornya dapat dijelaskan sebagai berikut : Evaluasi dan analisis kinerja kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 beserta indikatornya dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN PROG/KEG			ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	REALISASI KINERJA (%)
Belanja daerah			**4,275,668,487**	**4,047,199,835**	**94.66%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**		**3,115,468,133**	**2,930,282,435**	**94.06%**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		20,000,000	17,800,000	**89.00%**
	1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4,990,000	2,790,000	**55.91%**
	2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	3,000,000	3,000,000	**100.00%**
	3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	3,000,000	3,000,000	**100.00%**
	4	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	3,000,000	3,000,000	**100.00%**
	5	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	2,990,000	2,990,000	**100.00%**
	6	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3,020,000	3,020,000	**100.00%**
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		2,193,676,775	2,044,833,627	**93.21%**
	1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2,183,386,275	2,034,543,127	**93.18%**
	2	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	4,290,500	4,290,500	**100.00%**
	3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3,000,000	3,000,000	**100.00%**
	4	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN SKPD	3,000,000	3,000,000	**100.00%**
	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		9,000,000	9,000,000	**100.00%**
	1	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	9,000,000	9,000,000	**100.00%**

	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	24,000,000	24,000,000	**100.00%**
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	24,000,000	24,000,000	**100.00%**
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	399,792,550	399,462,564	**99.92%**
1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	16,604,000	16,604,000	**100.00%**
2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	7,868,550	7,861,800	**99.91%**
3	PENEYDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	27,604,000	27,604,000	**100.00%**
4	PENEYDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10,742,000	10,742,000	**100.00%**
5	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9,000,000	9,000,000	**100.00%**
6	FASILITAS KUNJUNGAN TAMU	11,134,000	11,134,000	**100.00%**
7	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	316,840,000	316,516,764	**99.90%**
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2,952,000	2,952,000	**100.00%**
1	PENGADAAN MEBEL	2,952,000	2,952,000	**100.00%**
	PENYEDIAAN JASA URUSAN PEMERINTAH DAERAH	378,136,226	347,999,823	**92.03%**
1	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5,000,000	5,000,000	**100.00%**
2	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	87,684,000	57,589,290	**65.68%**
3	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	285,452,226	285,410,533	**99.99%**
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	87,910,582	84,234,421	**95.82%**

1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS JABATAN	59,725,095	56,929,675	**95.32%**
2	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	13,603,500	12,739,746	**93.65%**
3	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	14,581,987	14,565,000	**99.88%**
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**715,594,000**	**689,628,300**	**96.37%**
	KEGIATAN PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	387,222,000	371,316,080	**95.89%**
1	PENYEDIAAN PRASARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP	387,222,000	371,316,080	**95.89%**
	PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	239,918,000	231,035,220	**96.30%**
1	PENGEMBANGAN KAPASITAS NELAYAN KECIL	18,600,000	18,300,000	**98.39%**
2	PELAKSANAAN FASILITASI PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN NELAYAN KECIL	63,948,000	62,810,000	**98.22%**
3	PELAKSANAAN FASILITAS BANTUAN PENDANAAN, BANTUAN PEMBIAYAAN, KEMITRAAN USAHA	157,370,000	149,925,220	**95.27%**
	PENERBITAN TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	88,454,000	87,277,000	**98.67%**
1	PELAYANAN PENERBITAN TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN BERUKRUAN SAMPAI DENGAN 10 GT	88,454,000	87,277,000	**98.67%**
3	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**262,411,254**	**250,473,400**	**95.45%**

	PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL		118,917,300	109,581,600	**92.15%**
1	PEMBERIAN PENDAMPINGAN, KEMUDAHAN AKSES ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI, SERTA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		118,917,300	109,581,600	**92.15%**
	PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN		143,493,954	140,891,800	**98.19%**
1	PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA		120,153,954	117,551,800	**97.83%**
3	PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PEMBUDIDAYA IKAN DI DARAT		23,340,000	23,340,000	**100.00%**
4	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**		**25,270,000**	**25,270,000**	**100.00%**
	PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA DAN GENANGAN AIR		25,270,000	25,270,000	**100.00%**
1	PENGAWASAN USAHA PERIKANAN TANGKAPDI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUPATEN/KOTA		25,270,000	25,270,000	**100.00%**
5	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**		**156,925,100**	**151,545,700**	**96.57%**
	PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL		34,325,100	29,030,000	**84.57%**
1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil		34,325,100	29,030,000	**84.57%**
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		122,600,000	122,515,700	**99.93%**

1	PENINGKATAN KETERSEDIAAN IKAN UNTUK KONSUMSI DAN USAHA PENGOLAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	122,600,000	122,515,700	**99.93%**

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas serta analisis capaian masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN	REALISASI KINERJA TAHUN
				Tahun 2023	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terselenggaranya Tata Kelola pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	48	12,27
			Nilai SAKIP perangkat daerah (kategori)	B	BB
		Meningkatnya Tata Kelola Dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya urusan pemerintahan setiap tahun (bulan)	12	12
2	Terpenuhinya Kebutuhan Hasil Perikanan Budidaya untuk Masyarakat Labuhanbatu		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perikanan Budidaya	5.8	5.97

		Meningkatnya produksi perikanan budidaya setiap tahunnya	Peningkatan Produksi Budidaya Ikan (persen)	12	11.9
3	Terpenuhinya Kebutuhan Hasil Perikanan Tangkap untuk Masyarakat Labuhanbatu		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perikanan Tangkap	30	33.38
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap setiap tahunnya	Peningkatan Produksi Penangkapan Ikan (persen)	5	2.9
4	Terwujudnya Pengolahan dan Pengawasan Perikanan		Persentase Capaian Pengawasan Perikanan	100	100
			Persentase Pengolahan Hasil Perikanan	100	100
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Terjaminnya Pelestarian Spesies Ikan yang dilindungi (spesies)	1	1

		Pengolahan Hasil Perikanan	Target Konsumsi Ikan daerah (Kg/Kap/Tahun)	44,24	44,12

(SUMBER DATA : HASIL VALIDASI DARI DATA YANG DIPEROLEH PETUGAS PENCACAH LAPANGAN)

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Tujuan I : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel dengan Indikator Tujuan sebagai berikut :

1. NILAI REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH

A. Indikator Tujuan Dinas dalam mencapai nilai reformasi birokrasi perangkat daerah diukur melalui indikator kinerja sebagaimana telah dituangkan dalam penetapan kinerja. Adapun Realisasi nilai reformasi birokrasi perangkat daerah pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		TAHUN 2023			
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Point)	45	12.27	45	12.27	45	12.27

Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin) masih sangat rendah belum dapat mencapai target sebesar 45, hal ini disebabkan oleh masih banyak kekurangan dan keterbatas dinas dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Harapannya tahun.

2. NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH

Bila dibandingkan dengan tahun 2022 nilai poin tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 12.75 poin dan kisaran kategori BB (>70-80) yaitu SANGAT BAIK. Peringkat OPD dalam satu kabupaten untuk Dinas Kelautan dan Perikanan masuk ke peringkat ke-2 pada tahun 2023.

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
	Target	Poin	Realisasi	Target	Poin	Realisasi
Nilai SAKIP perangkat daerah (Kategori)	-	65.40	B	-	78.15	BB

B. Sasaran strategis dinas adalah Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan diukur melalui indikator sasaran yaitu terlaksananya urusan pemerintahan setiap tahun yaitu sebanyak 12 bulan.

Program dan kegiatan TA. 2023 yang mendukung indikator kinerja nilai reformasi birokrasi antara lain:

URAIAN PROG/KEG		REALISASI KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1		2	3	4
Belanja daerah		**93.20**	**4,275,668,487**	**3,985,075,682**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**92.06**	**3,115,468,133**	**2,868,158,282**
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.0	20,000,000	17,800,000

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.9	4,990,000	2,790,000
2	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	100.0	3,000,000	3,000,000
3	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd	100.0	3,000,000	3,000,000
4	Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd	100.0	3,000,000	3,000,000
5	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa-Skpd	100.0	2,990,000	2,990,000
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.0	3,020,000	3,020,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90.4	2,193,676,775	1,982,709,474
1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	90.3	2,183,386,275	1,972,418,974
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	100.0	4,290,500	4,290,500
3	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	100.0	3,000,000	3,000,000
4	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Skpd	100.0	3,000,000	3,000,000
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100.0	9,000,000	9,000,000
1	Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada Skpd	100.0	9,000,000	9,000,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.0	24,000,000	24,000,000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100.0	24,000,000	24,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.9	399,792,550	399,462,564

1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.0	16,604,000	16,604,000
2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	99.9	7,868,550	7,861,800
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.0	27,604,000	27,604,000
4	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	100.0	10,742,000	10,742,000
5	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	100.0	9,000,000	9,000,000
6	Fasilitas Kunjungan Tamu	100.0	11,134,000	11,134,000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	99.9	316,840,000	316,516,764
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.0	2,952,000	2,952,000
1	Pengadaan Mebel	100.0	2,952,000	2,952,000
	Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah	92.0	378,136,226	347,999,823
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.0	5,000,000	5,000,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	65.7	87,684,000	57,589,290
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.0	285,452,226	285,410,533
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.8	87,910,582	84,234,421
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	95.3	59,725,095	56,929,675
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	93.7	13,603,500	12,739,746

3	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	99.9	14,581,987	14,565,000
2	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**96.4**	**715,594,000**	**689,628,300**
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	95.9	387,222,000	371,316,080
1	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	95.9	387,222,000	371,316,080
	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	96.3	239,918,000	231,035,220
1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	98.4	18,600,000	18,300,000
2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan Dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	98.2	63,948,000	62,810,000
3	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	95.3	157,370,000	149,925,220
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 Gt Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	98.7	88,454,000	87,277,000
1	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukruan Sampai Dengan 10 Gt	98.7	88,454,000	87,277,000
3	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**95.5**	**262,411,254**	**250,473,400**
	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	92.1	118,917,300	109,581,600
1	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan	92.1	118,917,300	109,581,600
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	98.2	143,493,954	140,891,800
1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	97.8	120,153,954	117,551,800

3	Pembinaan Dan Pemantauan Pembudidaya Ikan Di Darat	100.0	23,340,000	23,340,000
4	**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan**	**100.0**	**25,270,000**	**25,270,000**
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air	100.0	25,270,000	25,270,000
1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkapdi Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	100.0	25,270,000	25,270,000
5	**Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**96.6**	**156,925,100**	**151,545,700**
	Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil	84.6	34,325,100	29,030,000
1	Pelaksanaan Bimbingan Dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil	84.6	34,325,100	29,030,000
	Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	99.9	122,600,000	122,515,700
1	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi Dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	99.9	122,600,000	122,515,700

dari realisasi sub-kegiatan diatas ditemukan hanya 2 sub-kegiatan yang tidak mencapai target 76% yaitu ” Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah” disebabkan oleh pagu anggaran melebihi kebutuhan dan ” Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik” dikarenakan iuran air yang sudah normal pembayarannya.

Tujuan 2 : Terpenuhinya Kebutuhan Hasil Perikanan Budidaya Untuk Masyarakat Labuhanbatu dengan Indikator Tujuan sebagai berikut :

1. PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PERIKANAN BUDIDAYA

A. Dalam rangka Terpenuhinya Kebutuhan Hasil Perikanan Budidaya untuk Masyarakat Labuhanbatu di Kabupaten Labuhanbatu maka indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perikanan Budidaya. Jumlah produksi perikanan Budidaya tahun 2023 adalah 1.622.820 kg atau 1.622,82 ton.

Kecamatan Subdistrict	**Budidaya (ton)** ***Aquaculture***	
	2022	**2023**
(1)	(2)	(3)
Bilah Hulu	367.993	527.15
Pangkatan	14.773	70.50
Bilah Barat	103.188	290.05
Bilah Hilir	435.670	31.40
Panai Hulu	19.000	92.50
Panai Tengah	11.100	54.00
Panai Hilir	7.200	0.38
Rantau Selatan	236.242	374.32
Rantau Utara	125.062	182.52
Labuhanbatu	**1320.228**	**1622.82**

(*sumber: Labuhanbatu Dalam Angka Tahun 2024*)

Jumlah kebutuhan ikan ditetapkan sebagai target konsumsi ikan tahun 2023 pada Rencana Strategis Dinas 2022-2026 sebesar 44.24 kg/Kap/tahun dengan jumlah penduduk sebesar 513.826 jiwa (sumber : *publikasi Labuhanbatu Dalam Angka tahun 2023*) maka:

Jumlah Kebutuhan Total Ikan = Jumlah Konsumsi Ikan Perkapita X Jumlah Penduduk

Jumlah Kebutuhan total ikan = 44.24 x 513.826
Jumlah Kebutuhan total ikan = 22,731,662.24 kg/tahun.

Dari data diatas jumlah produksi budidaya tahun 2023 adalah 1.622.820 kg maka persentase pemenuhan kebutuhan perikanan budidaya (PKb) adalah jumlah produksi perikanan budidaya (Pb) dibagi jumlah kebutuhan total ikan (T) dikali 100 persen.

Dengan rumus : PKb = 1.622.820 /22,731,662.24 x 100%

PKb = 7.14%

Indikator Kinerja	**Tahun 2022**		**Tahun 2023**	
	TARGET	**REALISASI**	**TARGET**	**REALISASI**
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perikanan Budidaya (%)	5.80	5.97	5.80	7.14

No	**Program/Kegiatan**	**Persentase**	**Target**	**Realisasi**
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**95.5**	**262,411,254**	**250,473,400**
	PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL	92.1	118,917,300	109,581,600
1	PEMBERIAN PENDAMPINGAN, KEMUDAHAN AKSES ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI, SERTA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	92.1	118,917,300	109,581,600

	PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	98.2	143,493,954	140,891,800
1	PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	97.8	120,153,954	117,551,800
3	PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PEMBUDIDAYA IKAN DI DARAT	100.0	23,340,000	23,340,000

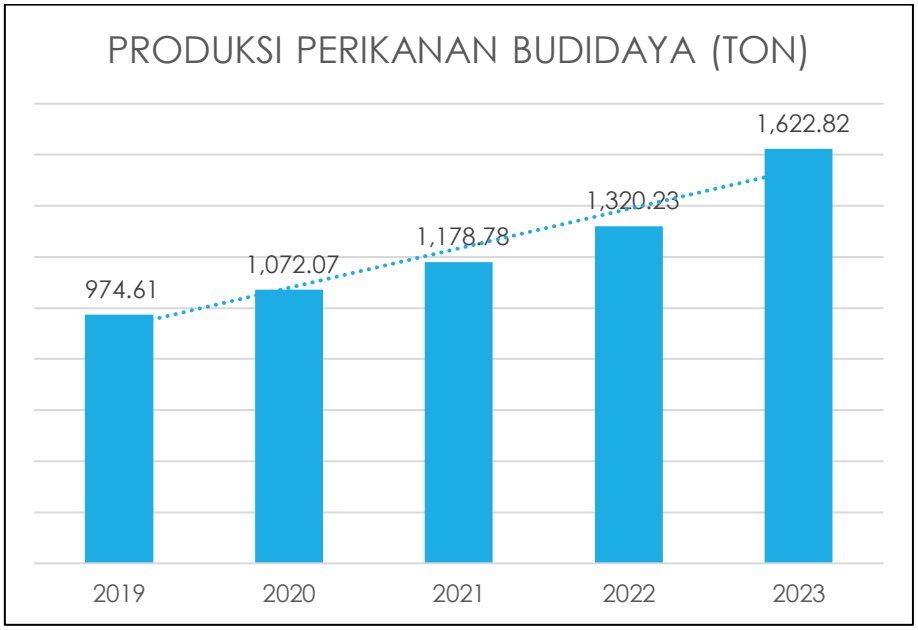
Pencapaian hasil pemenuhan kebutuhan budidaya sebesar 7.14% melebihi target sebesar 1.34% dari yang telah ditetapkan sebesar 5.80%. Pencapaian tersebut didukung oleh Program dan Kegiatan yang telah di tetapkan Tahun 2023 antara lain :

- Budidaya dalam ember (Budikdamber)
- Pelatihan probiotik
- Bantuan benih Ikan Patin dan Pakan
- Bantuan benih Ikan Gurami dan Pakan

B. Produksi Perikanan Budidaya 2018-2022

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	Pertumb 2023 thp 2022 (%)	Pertumb 2023 thp 2019 (%)	Pertumb rata-rata /thn (%)
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	974.61	1.072,07	1178.775	1320.23	1622,82	23	67	10.52

Grafik Produksi Perikanan Budidaya (Ton) 2018-2022



Pada tahun 2023 produksi budidaya adalah 1.622,82 ton mengalami peningkatan 302.59 ton atau sebesar 22.91%, sementara produksi budidaya nasional tahun 2023 sebesar 24.74 juta ton.

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023 (Ton)		
Kabupaten (Ton)	Nasional (Ton)	Perbandingan
1.622,82	24.740.000	1:15.245

Artinya produksi budidaya kabupaten Labuhanbatu memberi sumbangan sebesar 0.0066% terhadap produksi budidaya nasional termasuk rumput laut sebesar 24.74 juta ton.

- **Analisis Keberhasilan :**

Produksi perikanan budidaya dari tahun 2019-2023 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini karena adanya upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya diantaranya :

1. Bantuan benih ikan dan pakan setiap tahunnya;
2. Pemanfaatan lahan yang mulai produktif atau pekarangan rumah dengan budidaya lele di kolam terpal;
3. Pelatihan budidaya melalui system budidaya probiotik yang bertujuan untuk mengurangi beban belanja pakan;
4. Pelatihan Budidaya Dalam Ember;
5. Pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan melalui pelatihan dan studi banding.

- **Analisis Kegagalan:**

Kendala-kendala yang masih dihadapi dalam mengembangkan usaha perikanan budidaya antara lain:

1. Harga pakan masih terlalu tinggi;
2. Ketersedian sumber air yang sesuai untuk budidaya masih sedikit; dan
3. Standart mutu Benih Ikan belum ada untuk menghasilkan kualitas Benih Ikan yang baik.

Solusi Alternatif yang dilakukan untuk mencapaian target produksi budidaya didukung oleh Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan Tahun 2023 antara lain :

1. Kegiatan Pelatihan Budidaya Ikan Lele Dalam Ember (BUDIKDAMBER)

No	Nama Kelompok	Alamat	Jumlah Benih Lele (Ekor)	Jumlah Peserta
1	DAHLIA	Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan	500	40
2	DASAWISMA CEMPAKA	Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara	500	40
3	PKK DESA TANJUNG MEDAN	Desa Tanjung Medan, Kecamatan Bilah Barat	500	40
4	ANGGREK BULAN	Desa Gunung Selamat, Kecamatan Bilah Hulu	500	40

5	MATAHARI	Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan Pangkatan	500	40
6	SEHATI	Desa Sei Tarolat, Kecamatan Bilah Hilir	500	40
7	WANITA KARYA	Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu	500	40
8	MAJU BERSAMA	Desa Bagan Bilah, Kecamatan Panai Tengah	500	40
9	PKK MAJU DESA WONOSARI	Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir	500	40

2. Pelatihan Probiotik

No	Nama Tempat Pelatihan	Alamat	Tanggal Pelatihan	Jumlah Peserta
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Kantor Kelurahan Pulo Padang	Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara	22 Mei 2023	40
2	Kantor Kelurahan Ujung Bandar	Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan	22 Mei 2023	40
3	Kantor Desa Sei Nahodaris	Desa Sei Nahodaris, Kecamatan Panai Tengah	22 Mei 2023	40
4	Kantor Desa Sei Rakyat	Desa Sei Rakyat, Kecamatan Panai Tengah	22 Mei 2023	40
5	Kantor Desa Sei Pelancang	Desa Sei Pelancang, Kecamatan Panai Tengah	23 Mei 2023	40
6	Kantor Desa Sei Siarti	Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah	23 Mei 2023	40
7	Kantor Desa Bagan Bilah	Desa Bagan Bilah, Kecamatan Panai Tengah	24 Mei 2023	40

8	Kantor Desa Selat Beting	Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah	24 Mei 2023	40
9	Kantor DesaTanjung Medan	Desa Tanjung Medan, Kecamatan Bilah Barat	25 Mei 2023	40
10	Kantor Desa Tanjung Harapan	Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan	01 Desember 2023	25
11	Kantor Desa Bandar Tinggi	Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bilah Hulu	04 Desember 2023	25
14	Kantor Desa Janji	Desa Kampung Dalam, Kecamatan Bilah Hulu	04 Desember 2023	25

3. Bantuan Benih Patin dan Pakan

No	Nama Kelompok	Nama Ketua Kelompok	Alamat	Jumlah Benih Patin	Jumlah Pakan
1	2	3	4	5	6
1	Koperasi Satu Tekad Bersama	Salam	Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir	2000 Ekor	150 Kg

4. Bantuan Benih Gurami dan Pakan

No	Nama Kelompok	Nama Ketua Kelompok	Alamat	Jumlah Benih Patin	Jumlah Pakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tunas Jaya	Prastio	Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat	5000 Ekor	540 Kg
2	Barokah	Jurianto		2500 Ekor	270 Kg

			Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu		

5. Produksi Benih Ikan dari Balai Benih Ikan (BBI) dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Tahun 2023

No	Nama UPR	Alamat UPR	Jenis Ikan	Produksi UPR (Ekor/Tahun)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Ikan Sukses	Kel. Urung Kompas, Kec. Rantau Selatan	1. Gurami	361,800
			2. Lele	1,366,800
			3. Mas	64,320
			4. Nila	170,850
			5. Patin	160,800
2	AAN	Desa Lingga Tiga, Kec. Rantau Selatan	1. Gurami	30,150
			2. Lele	763,800
			3. Mas	60,300
			4. Nila	70,350
			5. Patin	40,200
3	Bina Guna I	Kel. Urung Kompas, Kec. Rantau Selatan	1. Gurami	120,600
			2. Lele	241,200
			3. Mas	0
			4. Nila	361,800
			5. Patin	0
4	Bina Guna II	Kel. Urung Kompas, Kec. Rantau Selatan	1. Gurami	0
			2. Lele	261,300
			3. Mas	40,200
			4. Nila	201,000
			5. Patin	0

5	Bina Guna III	Kel. Urung Kompas, Kec. Rantau Selatan	1. Gurami	0
			2. Lele	301,500
			3. Mas	30,150
			4. Nila	301,500
			5. Patin	0
6	Karya Bakti	Kel. Ujung Bandar, Kec. Rantau Selatan	1. Gurami	0
			2. Lele	482,400
			3. Mas	0
			4. Nila	0
			5. Patin	0
7	Barokah	Desa Pematang Seleng, Kec. Bilah Hulu	1. Gurami	201,000
			2. Lele	1,396,950
			3. Mas	0
			4. Nila	170,850
			5. Patin	160,800
8	Sapokat	Kel. Aek Paing, Kec. Rantau Selatan	1. Gurami	60,300
			2. Lele	371,850
			3. Mas	0
			4. Nila	0
			5. Patin	70,350
9	Sido Selamat	Desa Tebing Linggahara, Kec. Bilah Barat	1. Gurami	0
			2. Lele	0
			3. Mas	0
			4. Nila	0
			5. Patin	0
10	Rezeky	Kel. Ujung Bandar, Kec. Rantau Selatan	1. Gurami	0
			2. Lele	100,500
			3. Mas	0
			4. Nila	0

			5. Patin	30,150
11	Produksi BBI Rantauprapat	Jl. Wr. Supratman, Kec. Rantau Utara	1. Gurami	0
			2. Lele	402
			3. Mas	0
			4. Nila	40,200
			5. Patin	0
TOTAL				**8,034,372**

Jumlah Produksi Benih Ikan Tahun 2022 dan 2023

No	2022 (ekor)	2023 (ekor)
1	40,229,800	8,034,372

Produksi benih ikan tahun 2022 memiliki produksi yang tinggi karena proses pemijahan yang banyak dilakukan dan UPR memiliki indukan baru yang masih produktif. Sedangkan pada tahun 2023 produksi benih mengalami penurunan dikarenakan indukan ikan banyak yang sudah tidak produktif dan proses pemijahan banyak yang mengalami kegagalan.

Tujuan 3 : Terpenuhinya Kebutuhan Hasil Perikanan Tangkap Untuk Masyarakat Labuhanbatu dengan Indikator Tujuan sebagai berikut :

1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perikanan Tangkap

A. Dalam rangka Terpenuhinya Kebutuhan Hasil Perikanan Tangkap untuk Masyarakat Labuhanbatu di Kabupaten Labuhanbatu maka indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perikanan Tangkap.

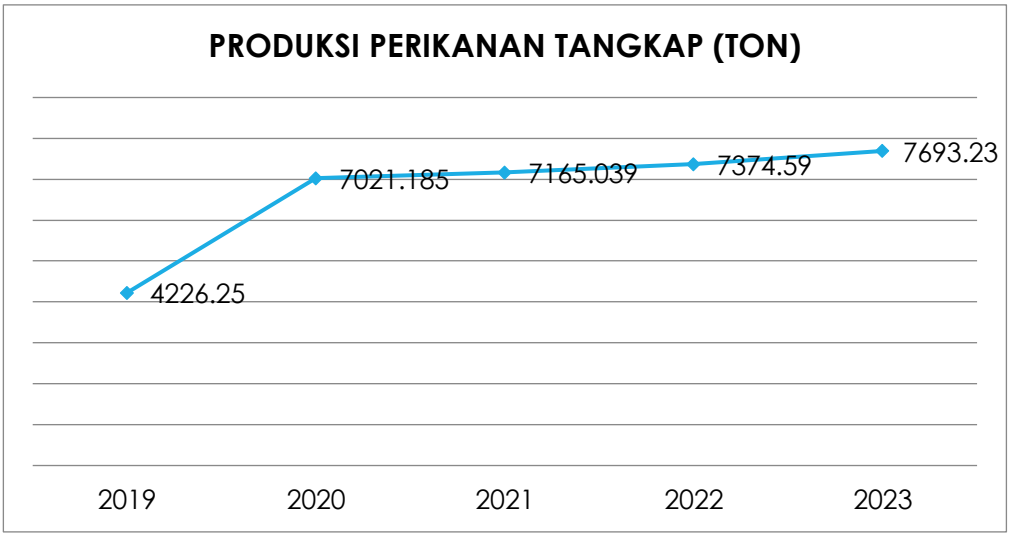
Jumlah produksi perikanan Tangkap tahun 2023 adalah 7.693.230 kg atau 7.693,23 ton.

Kecamatan Subdistrict	Perikanan Tangkap *Capture Fisheries*	
	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Bilah Hulu	2.72	2.63
Pangkatan	3.81	3.42
Bilah Barat	1.53	1.44
Bilah Hilir	55.38	57.39
Panai Hulu	125.78	158.35
Panai Tengah	352.64	440.11
Panai Hilir	6840.78	7029.33
Rantau Selatan	0.65	0.52
Rantau Utara	0.06	0.04
Labuhanbatu	**7383.36**	**7693.23**

B. Produksi Perikanan Tangkap 2019-2023

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	Pertumb 2023 thp 2022 (%)	Pertumb 2023 thp 2019 (%)	Pertumb rata-rata /thn (%)
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	4.226,25	7021.185	7165.039	7374.59	7693.23	4.3	82	15.6

Grafik Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 2019-2023



Pada tahun 2023 produksi perikanan tangkap adalah 7693.23 ton mengalami peningkatan sebesar 318.64 ton dari tahun 2022 atau sebesar 4.3%, sementara produksi perikanan tangkap nasional tahun 2023 sebesar 5.76 juta ton.

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023 (Ton)		
Kabupaten (Ton)	Nasional (Ton)	Perbandingan
7.693,23	5.760.000	1:748,71

Artinya produksi budidaya kabupaten Labuhanbatu memberi sumbangan sebesar 0.13% terhadap produksi perikanan tangkap nasional sebesar 5.76 juta ton.

Produksi perikanan Tangkap di Kabupaten Labuhanbatu mengalami peningkatan dengan pertumbuhan tahun 2023 terhadap 2019 sebesar 82% dan rata-rata pertumbuhan tiap tahun produksi perikanan tangkap dari tahun 2019 sampai dengan 2023 sebesar 15.6%.

- **Analisis Keberhasilan:**

Pencapaian tersebut didukung oleh Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan Tahun 2023 antara lain :

No	Program/Kegiatan/Sub-kegiatan	Target	Realisasi	Persen
1	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**715,594,000**	**689,628,300**	**96.4%**
	KEGIATAN PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	387,222,000	371,316,080	95.9%
1	PENYEDIAAN PRASARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP	387,222,000	371,316,080	95.9%
	PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	239,918,000	231,035,220	96.3%
1	PENGEMBANGAN KAPASITAS NELAYAN KECIL	18,600,000	18,300,000	98.4%
2	PELAKSANAAN FASILITAS BANTUAN PENDANAAN, BANTUAN PEMBIAYAAN, KEMITRAAN USAHA	63,948,000	62,810,000	98.2%
	PENERBITAN TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	88,454,000	87,277,000	98.7%
1	PELAYANAN PENERBITAN TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN BERUKRUAN SAMPAI DENGAN 10 GT	88,454,000	87,277,000	98.7%

1. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP). Sesuai dengan PERMEN KP no.58 tahun 2020 tentang Usaha PErikanan Tangkap, disebutkan bahwa Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil yang selanjutnya disingkat TDKP adalah bukti tertulis yang menyatakan bahwa Kapal Penangkap Ikan tersebut dimiliki oleh Nelayan Kecil. TDKP yang sudah terfasilitasi pada tahun 2022 adalah 49 Kapal dan Tahun 2023 sebanyak 0 (nol) Kapal.
2. Jenis Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan yang diberikan:

NO	Jenis Alat Tangkap	Nama Kelompok	Alamat	Jumlah
1	Gubal	KUB NElayan Setia	Kel. Sei Berombang, Kec. Panai Hilir	14 paket
2	Gembung	KUB BAWAL PUTIH	Desa Sei Sakat, Kec. Panai Hilir	14 paket
3	Senangin	KUB KUDA LAUT	Desa Sei Sakat, Kec. Panai Hilir	13 Paket
4	Cool Box	KUB KUDA LAUT	Desa Sei Sakat, Kec. Panai Hilir	10 Paket

3. Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)

Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) adalah identitas Tunggal Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Dasar hukum pelaksanaan KUSUKA adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/Permen-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 5 September 2017.

KUSUKA mempunyai enam fungsi utama dan lima tujuan sebagaimana berikut.

KUSUKA memiliki 6 (enam) fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai Identitas meliputi Integrasi semua kartu pelaku usaha KP di KKP menjadi satu kartu, Integrasi satu data stakeholder KKP yang dapat digunakan lintas eselon, dan Pemanfaatan data dengan K/L lain;
2. Sebagai Pelindung meliputi Prasyarat calon penerima BPAN dan asuransi lainnya (asuransi perikanan, asuransi petambak garam).

3. Sebagai pemberdayaan meliputi Prasyarat calon penerima BP dari unit eselon teknis penyalur bantuan, Permohonan pengajuan kredit dari LPMUKP dan mitra LKB/LKBB penyalur kredit perikanan dan kelautan;
4. Sebagai pelayanan meliputi Prasyarat pengajuan permohonan ijin yang dikeluarkan oleh semua eselon teknis pengelola perijinan di KKP, Prasyarat pemberian sertifikat sebagai dokumen pendukung usaha KP yang dikeluarkan oleh unit teknis pengelola sertifikasi di lingkungan KKP, dan Prasyarat penggunaan layanan karantina KKP;
5. Sebagai pembinaan meliputi Prasyarat untuk mendapatkan program pelatihan di bidang KP, dan Prasyarat untuk mendapatkan program penyuluhan KP;
6. Sebagai monitoring dan evaluasi meliputi Sarana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program lingkup KKP dan lintas K/L, Dasar perencanaan program dan pengambilan kebijakan, dan Integrasi program/kegiatan dengan K/L lain.

Adapun Tujuan Kartu KUSUKA antara lain:

1. Meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan;
2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi program lintas Eselon I dalam lingkup KKP baik dari segi data ataupun dari segi anggaran;
3. Instrument harmonisasi kebijakan serta standarisasi kartu yang diterbitkan oleh KKP;
4. Melengkapi pendataan data identitas pelaku usaha kelautan dan perikanan termasuk menghindari Redundansi Data;
5. Meningkatkan kemungkinan bekerja sama dengan berbagai mitra seperti perbankan.

Kartu Pelaku Usaha yang telah di masukkan kedalam aplikasi satudata KKP adalah:

No	2022	2023
	60	200



Contoh Kartu KUSUKA

- **Analisis Kegagalan:**

Walaupun data mengalami peningkatan namun permasalahan perikanan tangkap masih banyak antara lain;

1) Perairan selat Malaka termasuk kawasan yang telah mengalami *over fishing* (penangkapan berlebih) dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 1. Status Sumber Daya Ikan di 10 WPP Menurut Komisi Pengkajian Stok Ikan

No.	Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	Demersal	Udang	Pelagis Kecil	Pelagis Besar
I	Selat Malaka	*Overfished*	*Overfished*	*Fully exploited*	*Uncertain*
II	Laut Cina Selatan	*Fully exploited*	*Moderate*	*Overfished*	*Uncertain*
III	Laut Jawa	*Fully exploited*	*Fully exploited*	*Overfished*	*Uncertain*
IV	Laut Flores dan selat Makasar	*Fully exploited*	*Overfished*	*Moderate*	*Uncertain*
V	Laut Banda	*Under-Exploited/ Uncertain*	*Uncertain*	*Moderate*	*Moderate*
VI	Laut Arafura	*Fully exploited-overfished*	*Overfished*	*Moderate*	*Uncertain*
VII	Teluk Tomini dan Laut Sulawesi	*Moderate*	-	*Moderate*	*Fully exploited*
VIII	Samudra Pasifik dan Laut Sulawesi	*Uncertain*	*Uncertain*	-	*Overfished*
IX	Samudra Hindia sebelah barat Sumatera	*Fully exploited*	*Fully exploited*	*Moderate*	*Fully exploited*
X	Samudra Hindia sebelah selatan Jawa	*Fully exploited*	*Fully exploited*	*Fully exploited*	*Fully exploited*

Khusus WPP 571 (Selat Malaka) hanya ikan pelagis besar yang tidak tersedia data pemanfaatannya, sedangkan untuk jenis ikan demersal dan udang pemanfaatannya sudah *overfished* (penangkapan berlebih) yang merupakan pertanda bahwa harus segera dilakukan regulasi pengelolaan pemanfaatan agar tidak terjadi penurunan stok atau sumber daya;

2) Tingkat kesejahteraan nelayan yang masih rendah; dan
3) Perlindungan terhadap nelayan masih kurang.

Adapun upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap diantaranya:

1. Regulasi perlindungan terbatas ikan terubuk dan waktu penangkapan ikan terubuk melalui Kepmen KP no.43/KEPMEN-KP/2016;
2. Pembinaan Kepada POKMASWAS dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan sebagai garda terdepan dalam hal pengawasan penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang dilarang;

3. Sosialisasi pelarangan pemakaian alat tangkap tarik 2 (dua);
4. Pemberian alat tangkap ramah lingkungan seperti Belat dan alat perangkap gurita dan lainnya;
5. Pembinaan dan monitoring penangkapan ikan terubuk;
6. Pendaftaran Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA), Kartu ini dibuat untuk indentitas nelayan dan pelaku usaha perikanan dan;
7. Pembuatan Asuransi nelayan diberikan dengan tujuan:
   a. Memberikan jaminan perlindungan risiko yang dialami nelayan pada saat bekerja menangkap ikan;
   b. Menumbuhkan kesadaran bagi nelayan terhadap pentingnya berasuransi;
   c. Membangun keinginan nelayan untuk ikut serta berasuransi secara mandiri;
   d. Memberikan bantuan bagi ahli waris; dan
   e. Memindahkan risiko yang seharusnya ditanggung nelayan kepada pihak penyedia asuransi.

Tujuan 4 : Terwujudnya Pengolahan dan Pengawasan Perikanan dengan Indikator tujuan sebagai berikut :

1. Persentase Capaian Pengawasan Perikanan.

Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1. Persentase Capaian Pengawasan Perikanan	100	100	100	100

Program dan kegiatan yang mendukung indikator Persentase Capaian Pengawasan Perikanan antara lain :

No	Program/Kegiatan/Sub-kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persen

1	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Terlindunginya spesies Ikan Terubuk**	**25,270,000**	**25,270,000**	**100%**
	PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA DAN GENANGAN AIR	Tetap terjaganya spesies Ikan Terubuk	25,270,000	25,270,000	100%
1	PENGAWASAN USAHA PERIKANAN TANGKAPDI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUPATEN/KOTA	1	25,270,000	25,270,000	100%

Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan disatu sisi memberikan keuntungan secara ekonomi namun disisi lain dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan bahkan kerusakan sumberdayanya.

Masyarakat nelayan dan masyarakat yang berdomisili di sekitar lingkungan perairan dan laut merupakan fokus utama yang diharapkan memiliki kesadaran untuk menjaga, mengawasi serta melestarikan seluruh potensi sumberdaya perikanan dan kelautan. Kesadaran akan pentingnya hal tersebut dapat dilihat dari peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan serta pelestarian sumberdaya alam yang ada dan juga dalam pemanfaatannya tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk terus mengoptimalkan serta memacu masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan, banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain :

1. Rendahnya tingkat pendidikan nelayan;
2. Daya dukung lingkungan yang rendah yang ditandai dengan sedikitnya jumlah wilayah tangkapan dan banyaknya jumlah nelayan;
3. Kurangnya SDM dinas yang berkompeten untuk melakukan pendampingan.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target yang diharapkan antara lain pembinaan dan pemberdayaan kepada POKMASWAS secara

berkelanjutan, sosialisasi/penyuluhan budaya kelautan dan pengawasan serta patroli bersama dengan pemerintah provinsi Sumatera Utara yang mengacu kepada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa 0 - 12 Mil Laut menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

2. Persentase Pengolahan Hasil Perikanan

Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1. Persentase Pengolahan Hasil Perikanan	-	-	100	92.49

Program dan kegiatan yang mendukung indikator Persentase Pengolahan Hasil Perikanan antara lain :

No	Program/Kegiatan/Sub-kegiatan	Target	Realisasi	Persen
1	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**156,925,100**	**151,545,700**	**96.6%**
	Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil	34,325,100	29,030,000	84.6
1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	34,325,100	29,030,000	84.6
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	122,600,000	122,515,700	99.9%

1	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi Dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	122,600,000	122,515,700	99.9%

Dalam hal pencapaian Persentase Pengolahan Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan berbagai kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut seperti melaksanakan :

1. Membuat stand Pameran perikanan pada saat HUT PEMKAB dan MTQ;
2. Pelatihan Pengolahan Ikan (Diversifikasi) dilaksanakan di 4 Lokasi yaitu di Desa Sei Lumut, Kec, Panai Hilir, Desa Telaga Suka,Kec, Panai Tengah, Desa Meranti Paham, Kec Panai Hulu dan Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir. Dimana pesertanya adalah remaja putri dan ibu PKK dan jumlah peserta masing -masing daerah sebanyak 50 orang; dan
3. Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN). Pada Tahun 2023 dilaksanakan di 6 Sekolah Dasar (SD), 3 di SD Rantau Utara dan 3 di SD Rantau Selatan.

kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai persentase pengolahan hasil perikanan diantaranya adalah:

1. Sarana dan prasarana pengolahan sebahagian masih tradisional;
2. Keterbatas Pemasaran produk olahan;dan
3. Keterampilan kerja yang masih rendah.

Untuk itu dibutuhkan langka-langkah berani yang inovatif dalam rangka mencapai produk olahan yang berdaya saing.

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu

mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Kelautan dan Perikanan dengan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan perumusan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan, Pengembangan Usaha, dan Pengembangan Perikanan Budidaya;
2. Melaksanakan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan, Pengembangan Usaha, dan Pengembangan Perikanan Budidaya;
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan, Pengembangan Usaha, dan Pengembangan Perikanan Budidaya;
4. Melaksanakan administrasi dinas bidang kelautan dan perikanan.

Target capaian kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD akan menghadapi Permasalahan antara lain yaitu :

A. Bidang Perikanan Budidaya Permasalahan yang ada pada saat ini dalam mencapai kondisi yang diinginkan pada masa mendatang Bidang Budidaya Perikanan adalah sebagai berikut :
    1. Rendahnya produktifitas perikanan budidaya dikarenakan pelaku usaha perikanan budidaya adalah skala kecil / tradisional dengan keterbatasan aspek permodalan, SDM, jaringan teknologi dan pasar;
    2. Belum optimalnya sarana dan prasarana perikanan budidaya;
    3. Terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul;
    4. Tingginya harga pakan;
    5. Ketidakstabilan harga jual dan keterbatasan pasar;
    6. Ketidaksiapan dalam menanggulangi hama dan penyakit;
    7. Peningkatan peluang pasar hasil perikanan budidaya;
    8. Pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya.
B. Bidang Perikanan Tangkap Berdasarkan kondisi pada saat ini sebagaimana dikemukakan di atas, permasalahan Bidang Perikanan Tangkap pada masa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi melalui upaya inovasi teknologi penangkapan ikan yang memperhatikan kaidah konservasi dan kelestarian ekosistem laut dan restrukturisasi armada perikanan tangkap;
2. Penurunan potensi Sumberdaya Ikan (SDI) akibat kerusakan habitat perairan, padat tangkap (*overfishing*) dan kerusakan lingkungan akibat pencemaran limbah industri dan limbah rumah tangga, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan;
3. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap, baik berupa pembangunan infrastruktur, peningkatan sarana tangkap maupun alat tangkap, dan SDM yang memadai;
4. Rendahnya SDM dan kelembagaan nelayan terkait pengetahuan, ketrampilan, penguasaan teknologi dan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan informasi belum memadai.

C. Bidang Pengelolaan Produk Perikanan Beberapa permalahan terkait bidang Pengelolaan Produk Perikanan antara lain:
1. Belum optimalnya integrasi sistem produksi hulu dan hilir;
2. Masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan secara memadai;
3. Rendahnya SDM dan kelembagaan pengolah terkait pengetahuan, ketrampilan, penguasaan teknologi dan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan informasi belum memadai;
4. Penumbuhan sentra-sentra pengolahan hasil perikanan baik usaha skala rumah tangga maupun skala besar yang ditunjang dengan dukungan permodalan, pemasaran dan peningkatan sumberdaya manusia;
5. Peningkatan peran kelompok, koperasi, dan lembaga keuangan dalam memberikan pelayanan kepada kelompok utamanya dalam penyediaan sarana dan prasarana produksi serta modal usaha;
6. Belum terpenuhinya sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan;

7. Belum beroperasinya Tempat Pendaratan Ikan (TPI) yang ada di Kabupaten Labuhanbatu.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu

Dokumen perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 – 2026 serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023.

Penyusunan reviu ini dimulai dengan merumuskan rencana program dan kegiatan dari masing-masing unit eselon III yang dilanjutkan dengan menjabarkan rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut kedalam Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan rencana kerja tersebut, maka akan diajukan untuk disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai Rencana Kerja tersebut. Setelah anggaran disetujui maka ditetapkan suatu penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pendekatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan *Money Follow Program*. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial dengan memperhatikan pada:

a. Pengendalian perencanaan;
b. Perkuatan perencanaan dan penganggaran;
c. Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan;
d. Perkuatan integrasi sumber pendanaan.

Dengan penjelasan sebagai berikut : Tematik berarti penekanan atau fokus pada perencanaan sampai dengan program prioritas. Holistik pendekatan menyeluruh dan komprehensif dari hulu sampai hilir. Integratif yang berarti integrasi dalam siapa berbuat apa dan integrasi sumber pendanaan. Spasial keterkaitan fungsi lokasi dari berbagai kegiatan yang terintegrasi.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, meliputi:

1. "Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan", dengan tujuan:
   a. meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
   b. menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan.
2. "Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional", dengan tujuan:
   a. optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
   b. meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
   c. meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
   d. meningkatnya sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan

e. optimalnya pengelolaan ruang laut.

3. “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”, dengan tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”, dengan tujuan meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi KKP.

1.2 Tujuan dan Sasaran Renja Provinsi Sumatera Utara

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2019-2023, merupakan tahapan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2005-2025. Orientasi difokuskan pada upaya mewujudkan tata kelolaan pemerintahan yang baik dan bersih, menggali dan mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan infrastruktur dan pelaksaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan peningkatan daya saing sektor agraris dan pariwisata.

Prioritas RPJMD provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 adalah:

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha.
2. Peningkatan dan perubahan atas pendidikan.
3. Pembangunan infrastruktur yang baik berwawasan lingkungan.
4. Penyedia layanan kesehatan yang bermutu.
5. Peningkatan daya saing pariwisata.

Kelima perioritas tersebut diharapkan pada akhirnya dapat membangun desa dan metata kota di Sumatera Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya OPD Diskp Provsu adalah untuk melaksanakan perioritas. Peningkatan daya saing agraris dan pariwisata diuraikan melalui :

1. Sektor pola pangan harapan realisasi 90,90% di tahun 2023. Program yang direncanakan melalui :

a. Penanganan daerah rawan pangan dengan pembangunan kawasan pangan lestari dan gerakan masyarakat mandiri pangan;
b. Pengawasan mutu dan keamanan melalui toko tani Indonesia;
c. Pengembangan diversifikasi pangan dengan sertifikasi buah dan sayuran.

2. Nilai tukar nelayan realisasinya 106.06 pada tahun 2023 program melalui peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing komoditi perikanan melalui :
   a. Meningkatkan produksi perikanan;
   b. Meningkatkan kualitas penyuluh.
3. Melalui peningkatan pengembangan destinasi pariwisata melalui kegiatan :
   a. Peningkatan pengembangan destinasi ecowisata.
   b. Peningkatan sadar wisata pada masyarakat.
   c. Promosi dan pemasaran pariwisata.

Adapun strategi yang akan diterapkan tujuan tersebut adalah :

1. Pengembangan diversifikasi pangan.
2. Penanganan daerah rawan pangan.
3. Sterilisasi harga dan pasaran pangan.
4. Pengawasan mutu dan keamanan pangan.
5. Pengembangan peternakan berbasis korporasi tani.
6. Pengembangan agroindustri melalui penerapan dan penanganan pasca pangan.

Keenam strategi tersebut diharapkan dapat mewujudkan ketahanan pangan melalui diversifikasi lahan yang ada dan kegiatan perikanan pada lahan yang produktif.

1.3 Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Adapun tujuan program-program tersebut merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima (5) tahun kedepan. Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan periode tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Terselenggaranya Tata Kelola pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel;
2. Tujuan 2 : Terpenuhinya Kebutuhan Hasil Perikanan Budidaya untuk Masyarakat Labuhanbatu;
3. Tujuan 3 : Terpenuhinya Kebutuhan Hasil Perikanan Tangkap untuk Masyarakat Labuhanbatu;
4. Tujuan 4 : Terwujudnya Pengolahan dan Pengawasan Perikanan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 dapat dilihat pada lampiran 1.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Jumlah Pagu Indikatif yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan, melalui yaitu sebesar Rp. **4.980.785.579,00** (*Empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) dengan sumber dana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sesuai dengan yang terlampir.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (Renja) 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan didasarkan pada kondisi dan potensi sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta tingkat perkembangan yang ingin dicapai pada tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan. Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para kepala OPD dan seluruh staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Dengan disusunnya Renja Tahun 2025 Dinas Labuhanbatu diharapkan berguna sebagai arah, pedoman dan landasan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan.

Demikian Rencana Kerja ini disusun dengan harapan dapat dianalisis dan dipertimbangkan penuangannya dalam R-APBD Tahun Anggaran 2025. Mari Bolo Labuhanbatu.

Demikian Rencana Kerja ini disusun dengan harapan dapat dianalisis dan dipertimbangkan penuangannya dalam R-APBD Tahun Anggaran 2025. Mari Bolo Labuhanbatu.

Rantauprapat, 16 Juli 2024
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN LABUHANBATU

Ir. ADLIN TANJUNG, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680303 199503 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LABUHANBATU
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						**4.980.785.579,00**							**4.544.500.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**4.980.785.579,00**							**4.544.500.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**4.980.785.579,00**							**4.544.500.000,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.547.716.329,00**						**-**	**3.690.500.000,00**	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 %			-	19.800.000,00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-	100 %	30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				20 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		4.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				20 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		4.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				20 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		4.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				20 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		4.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20 Laporan	3.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	1.800.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		3.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %			-	2.433.835.989,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-	100 %	2.414.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	2.422.405.989,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		2.400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10 Dokumen	6.630.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		8.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				20 Laporan	3.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		4.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	1.800.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		2.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 %			-	10.500.000,00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-	100 %	11.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	10.500.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		11.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 % 100 %			-	63.800.000,00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-	100 % 100 %	105.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				35 Paket	23.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	1.320.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	39.480.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		55.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			-	433.059.620,00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-	100 %	498.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.462.500,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		26.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	27.324.500,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	30.558.620,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		35.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	15.854.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	9.800.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		12.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	327.060.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		360.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1000 %			-	85.208.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-	100 %	110.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	85.208.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		110.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	414.714.140,00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-	100 %	410.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	79.800.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		65.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	322.914.140,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		330.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	86.798.580,00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-	100 %	112.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	37.846.980,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		55.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	10.981.600,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		12.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	22.580.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.390.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**	**-**			**-**	**709.380.000,00**						**-**	**287.000.000,00**	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	6 jenis			-	622.500.000,00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-	6 jenis	182.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	58.500.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		12.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				3 Unit	564.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		170.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	1 Kegiatan 4 Kelompok 157 Kelompok			-	56.730.000,00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-	1 Kegiatan 4 Kelompok 157 Kelompok	50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				30 Orang	30.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil														
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				30 Kelompok	26.730.000,00	Kab. Labuhanbatu, Panai Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Panai Hilir, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Panai Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	200 dokumen			-	30.150.000,00			-	-	-	200 dokumen	55.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT														
			Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan				10 Rekomendasi	30.150.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-		55.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**	**-**			**-**	**547.889.250,00**						**-**	**440.000.000,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	2 kelompok			-	40.758.000,00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-	2 kelompok	55.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				5 Kelompok	40.758.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		55.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	6077531 ekor 50 pasang 2 UPR 1 lokasi 1 UPR 1 lokasi 9 kecamatan			-	507.131.250,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-	6077531 ekor 50 pasang 2 UPR 1 lokasi 1 UPR 1 lokasi 9 kecamatan	385.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10 Unit	457.131.250,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		360.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat														
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				5 Unit	50.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**-**	**-**			**-**	**45.000.000,00**						**-**	**45.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	-	4 bulan 3 Kelompok			-	45.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-	4 bulan 3 Kelompok	45.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota														
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				3 Pelaku Usaha	45.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Panai Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Panai Hilir, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Panai Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		45.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**-**	**-**			**-**	**130.800.000,00**						**-**	**82.000.000,00**	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-			-	16.500.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-	-	22.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko														
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				12 Dokumen	16.500.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		22.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	40 orang 1 Kali			-	24.600.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-	40 orang 1 Kali	30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko														
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				5 Unit Usaha	24.600.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	89.700.000,00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-	-	30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3000 Ton	89.700.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	J U M L A H							**4.980.785.579,00**							**4.544.500.000,00**	